

# SKRIPSI

*RANI DAMAYANTI*

## PERJANJIAN BAKU SEBAGAI DASAR PENGUNAAN FASILITAS ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE)



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000

**PERJANJIAN BAKU SEBAGAI DASAR  
PENGUNAAN FASILITAS ATM  
(AUTOMATIC TELLER MACHINE)**


**SKRIPSI**



**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

  
**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 131 878 393

  
**Rani Damayanti**  
NIM. 039614324

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan pada Bab III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa perjanjian penggunaan fasilitas ATM antara nasabah dan bank adalah berbentuk baku, dimana pihak bank-lah yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perjanjian penggunaan fasilitas ATM tersebut, khususnya isi dari perjanjian, yang tidak jarang sangat memberatkan nasabah. Terlihat jelas bahwa bank berusaha menekan resiko yang mungkin timbul dan mengalihkannya pada nasabah, yaitu dapat dilihat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penggunaan fasilitas ATM tersebut.
- b. Bahwa perjanjian penggunaan fasilitas ATM antara nasabah dan bank yang sebelumnya telah dibakukan oleh pihak bank, secara tidak langsung telah menyebabkan kedudukan nasabah pemegang kartu ATM yang sah menjadi lemah. Sebaliknya kedudukan bank sebagai pembuat perjanjian penggunaan ATM menjadi kuat. Hal ini mengakibatkan jika suatu saat muncul kendala yang berasal dari keluhan pihak nasabah mengenai penggunaan fasilitas ATM, pihak nasabah pemegang sah kartu ATM-lah yang harus bertanggung gugat bagaimanapun keadaannya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh bank terhadap

masalah hilangnya dana nasabah akibat adanya transaksi yang bukan dilakukan oleh nasabah pemegang kartu ATM yang sah adalah sebatas membuktikan bahwa telah terjadi transaksi penarikan dana yang normal pada ATM dan khusus di Bank X sanggup memperlihatkan gambar pelaku atau orang yang melakukan transaksi penarikan dana tersebut.

## 2. Saran

- a. Bahwa untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk baku adalah sah hukumnya karena adanya asas kebebasan berkontrak dengan syarat isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu pula halnya dengan perjanjian baku yang diwujudkan dalam perjanjian penggunaan fasilitas ATM. Disebabkan moto dari didirikannya suatu bank adalah menganggap nasabah sebagai raja, maka sudah selayaknya bank memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi nasabah, khususnya nasabah pemegang kartu ATM yang sah karena dalam penggunaan fasilitas ATM sangat rentan dengan resiko.
- b. Hal yang seharusnya dilakukan oleh bank adalah menyeimbangkan kedudukan nasabah dengan bank terlebih dahulu dengan cara menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak sehingga tujuan diadakannya perjanjian penggunaan fasilitas ATM, yaitu pemenuhan prestasi, dapat tercapai sesuai dengan keinginan serta harapan masing-masing pihak dan

ini dapat dilakukan dengan cara peninjauan kembali terhadap klausul-klausul yang memberatkan nasabah dalam perjanjian penggunaan fasilitas ATM.

Di samping itu perlu juga untuk mengadakan suatu peraturan khusus yang berlaku secara umum untuk semua bank yang bertujuan agar bank dalam membuat perjanjian-perjanjian dengan nasabahnya tidak merugikan nasabah, sehingga ada pedoman bagi semua bank dalam membuat perjanjian-perjanjian tersebut, khususnya perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ATM. Guna mengisi kekosongan peraturan khusus tersebut, kiranya Bank Indonesia dapat berperan secara aktif dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bank dan nasabahnya.